

Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Pendekatan Kemasyarakatan di Lingkungan Pasar Tradisional Kota Tangerang Selatan

Joey Malvine Andry Pratama, Monica Margaret

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta
1743500165@student.budiluhur.ac.id, monica.margaret@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Pungutan liar menjadi momok yang sebenarnya berbahaya, namun seperti sudah diwajibkan oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji dan mendalami hal-hal yang menjadi faktor sosial masyarakat dalam menyikapi salah satu praktik negatif ini. Penelitian ini bicara tentang strategi pencegahan kejahatan dari perspektif kemasyarakatan, karna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita kerap kali berharap, menunggu dan bahkan menuntut tentang resah yang dirasakan dan keinginan yang selalu disuarakan. Penelitian ini sendiri menggunakan metode wawancara, observasi lapangan dan olah jurnal dan karya ilmiah dengan pendekatan penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa masih sangat minimnya koordinasi dan kepedulian antar lini masyarakat terutama dari kalangan pemerintahan kota Tangerang Selatan yang punya amanah dan tanggung jawab sebagai pengaman, pengayom dan mendukung kesejahteraan pedagang, distributor dan konsumen pasar tradisional. Oleh karena itu penulis menyarankan adanya kepedulian dengan memperkuat komitmen komunikasi dan integrasi untuk semua kalangan masyarakat dan memperbaiki kualitas dan pemerataan mutu pendidikan di Tangerang Selatan.

Kata Kunci: Pungutan liar, strategi pencegahan kejahatan, kemasyarakatan, pasar tradisional

ABSTRACT

Illegal levies are a scourge that is actually dangerous, but as is normalized by the community. This study examines and explores the things that are social factors in the community in responding to one of these negative practices. This study talks about crime prevention strategies from a societal perspective, because in the life of the nation and state, we often hope, wait and even demand about the restlessness that is felt and the desires that are always voiced. This research itself uses interviews, field observations and if journals and scientific works with a descriptive research approach. From the results of this thesis research, the author concludes that there is still very little coordination and concern between lines of society, especially from the South Tangerang city government which has the mandate and responsibility as a safety, protector and supports the welfare of traders, distributors and consumers of traditional markets. Therefore, the authors suggest a concern by strengthening communication and integration commitments for all circles of society and improving the quality and equity of education quality in South Tangerang.

Keywords: *Illegal levies, crime prevention strategies, society, traditional market*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang beragam, baik masyarakat maupun kebudayaannya. Karakter masyarakat yang didasari oleh perbedaan kebudayaan di setiap daerah, membuat negeri ini penuh dengan cerita “unik”. Ketika kita bergeser dari satu kota ke kota lain, paling tidak sudah ada sekitar 40% perbedaan yang cukup mencolok dari kota sebelumnya. Permasalahan masing-masing kota juga berbeda. Namun Sebagian besar kota biasanya berhadapan dengan masalah kesenjangan sosial.

Kesenjangan sosial pada prinsipnya muncul karena pendidikan yang belum merata. Ketimpangan pendidikan, membuat kualitas masyarakat Indonesia seakan jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun karakter bangsa dan motor untuk menggerakkan perekonomian suatu bangsa (Napitupulu, 2012). Kota Tangerang Selatan adalah lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. Selain kesenjangan sosial, masalah yang juga banyak terjadi di kota ini adalah persoalan pemenuhan kebutuhan hidup yang sulit, hampir sama dengan kota-kota lainnya di Jabodetabek. Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dan tingginya kesenjangan sosial membuat tingkat perekonomian masyarakat rendah dan angka kemiskinan meningkat.

Kesulitan ini akan semakin terasa ketika berkunjung ke pasar-pasar tradisional. Ada banyak oknum yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan dengan melakukan pungutan liar terhadap para pedagang maupun pengunjung pasar. Dengan dalih menjaga wilayah atau mengelola fasilitas umum, namun sebenarnya mereka meminta imbalan dengan meminta orang untuk mengeluarkan sejumlah uang demi mendapatkan fasilitas. Oknum tersebut juga bukan pihak berwenang, melainkan adalah masyarakat umum yang secara informal merasa wilayah tersebut adalah daerah kekuasaannya. Pada akhirnya, masyarakat merasa tidak nyaman namun lebih memilih untuk mengambil sikap aman saja terhadap persoalan ini. Hal ini karena Masyarakat merasa tidak mau terlibat masalah dan mencari urusan dengan oknum-oknum tersebut.

Pungutan liar di Indonesia cukup banyak terjadi. Fenomena ini punya kaitan erat dengan aksi premanisme. Premanisme pada prinsipnya juga lahir karena adanya kesenjangan sosial. Pungli umumnya terjadi di pusat keramaian, salah satunya adalah pasar tradisional. Di Kota Tangerang Selatan, pungli banyak terjadi. Motifnya mirip dengan daerah-daerah lain, yaitu berkaitan dengan penguasaan atau penjagaan lahan oleh oknum tertentu yang tidak memiliki dasar legalitas atau kewenangan terhadap daerah tersebut. Oknum tersebut biasanya hanya mengandalkan unsur budaya, keturunan, status sosial, relasi sosial bahkan fisik semata. Pungli yang dilakukan pada umumnya dilabeli sebagai “uang keamanan”.



Gambar 1 Praktik Pungutan Liar di Parkiran Pasar Lembang, Ciledug, Tangerang.

Sumber: Dokumentasi pribadi.

Atas dasar itulah, penelitian ini bermaksud untuk membahas strategi pencegahan pungutan liar berbasis pendekatan Masyarakat di lingkungan pasar tradisional. Pembahasan strategi pencegahan pungli menjadi penting karena reaksi masyarakat merupakan objek studi kriminologi. Sebagaimana tujuan dari ilmu kriminologi yaitu membantu mengatasi masalah kejahatan di Masyarakat, maka upaya pencegahan berbasis pendekatan Masyarakat merupakan salah satu jalan untuk menyatukan inisiatif, kepeduliandan Gerakan dari Masyarakat agar pungli yang meresahkan masyarakat dapat diminimalisir.

Community Based Crime Prevention Theory (CBCP)

Pencegahan kejahatan berbasis komunitas (masyarakat) adalah konsep pencegahan yang sangat erat kaitannya dengan salah satu objek studi kriminologi yaitu reaksi masyarakat. Dalam persoalan pungutan liar yang berbalut premanisme, CBCP sejatinya sangat dibutuhkan, mengingat ini adalah kondisi benturan “masyarakat vs masyarakat”. Premanisme melalui pungli yang dilakukan oknum tertentu, sebenarnya dilakukan oleh anggota masyarakat juga dengan “tajuk” ingin menjadi pengaman dan pengayom masyarakat dan berdalih dibalik “uang keamanan” tapi pada akhirnya malah merepotkan dan meresahkan anggota masyarakat lainnya.

Metodologi pencegahan kejahatan berorientasi tidak hanya dapat diwujudkan melalui tindakan situasional tetapi juga dapat dilakukan dengan tindakan sosial (Yunardhani, 2012). CBCP memang membutuhkan sebuah kajian, rencana, dan koordinasi yang baik antar lini. Sebuah pendekatan yang mengintegrasikan masyarakat bukan untuk tujuan melawan masyarakat terkait, tetapi justru merangkul dan mengayomi masyarakat yang selama ini “salah jalan” terhadap apa yang seharusnya menjadi pedoman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pencegahan kejahatan berbasis kemasyarakatan pada implementasinya akan melahirkan inisiatif dan etika kemitraan atau kerja sama antar lini masyarakat. Pada akhirnya, pendekatan ini akan melibatkan kepedulian secara komunal. Jika rasa individualistis masih ada di beberapa kalangan masyarakat, maka kerja sama yang baik akan sulit terwujud. Sebuah teori kemitraan harus memberikan perhatian khusus pada kapasitas inter-organisasional

untuk merespon masalah dengan kreativitas, intensitas, dan atau intervensi yang terkoordinasi. Model kemitraan yang diusulkan menunjukkan bahwa intervensi memiliki karakteristik penting yang dapat memprediksi keberhasilan siapa yang akan melakukan apa kepada siapa dengan dukungan lembaga- lembaga pelayanan (Yunardhani, 2012).

Dengan demikian, walaupun sebuah kemitraan memiliki rasa intervensi yang tinggi seiring dengan makin saling terkaitnya pihak-pihak yang bekerja sama, semua hal tetap harus dibuka, diperhitungkan dan dikomunikasikan dengan seksama. Kerja sama yang baik, berawal dari komunikasi yang baik dengan tidak lupa memperhatikan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Teori ini diharapkan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini untuk membahas upaya pencegahan pungli di pasar-pasar tradisional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada interpretasi hasil pengamatan lapangan secara langsung yang natural alamiah. Tujuan lain dari penelitian deskriptif ini adalah target untuk memberikan dan merekomendasikan solusi terbaik untuk permasalahan yang dibahas. Penelitian deskriptif akan menjadi metode yang dirasa paling memudahkan penulis dalam mengkaji persoalan pungutan liar dari hasil pengamatan lapangan langsung yang dibandingkan dengan teori pencegahan kejahatan berbasis masyarakat sebagai acuan penanganan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Melalui metode ini, harapannya penulis dapat menggambarkan fenomena pungli di pasar tradisional Kota Tangerang Selatan dan merumuskan strategi pencegahan berbasis pendekatan kemasyarakatan yang tepat untuk mengatasinya.

Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Juni 2021 dengan mengambil beberapa pasar tradisional sebagai lokasi penelitian, diantaranya: Pasar Ciputat, Pasar Jombang, Pasar Arinda, Pasar Maharta, Pasar Serpong, Pasar Prima, Pasar Pamulang, Pasar Jengkol, Pasar Cimanggis. Selain itu Pasar Lembang Ciledug Tangerang dan Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang juga dijadikan lokasi penelitian yang digunakan sebagai lokasi pembanding di luar Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi di pasar-pasar tradisional yang menjadi lokasi penelitian. Pada saat observasi, penulis juga mendokumentasikan kondisi dan temuan lapangan dalam bentuk foto. Selain itu, wawancara secara langsung juga dilakukan dengan tokoh masyarakat setempat dan narasumber dari berbagai kalangan untuk menggali pandangan mengenai persoalan pungutan liar ini. Data sekunder penelitian diperoleh melalui buku, jurnal, karya ilmiah dan berbagai artikel *online*.

Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian ini, terlebih dahulu akan akan dibahas temuan data lapangan yang merepresentasikan permasalahan pungli di pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan barulah kemudian akan disampaikan analisis dari perspektif strategi pencegahan berbasis pendekatan kemasyarakatan.

Budaya sangat identik dengan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan penerapannya tidak lagi memerlukan regulasi. Alo Liliweri (2003) dalam bukunya yang berjudul *Makna Budaya dan Komunikasi Antar Budaya* menjabarkan bahwa, sebagian besar kegiatan komunikasi antar pribadi selalu dimulai dengan kontak yang ditandai oleh percakapan kecil, percakapan sepintas lalu. Beliau juga menerangkan bahwa komunikasi dimulai dengan kontak, disusul interaksi, lalu komunikasi, dan terakhir transaksi pesan. Ini semua adalah bagian dari proses menuju suatu budaya. Dalam persoalan pungutan liar, budaya ini tercipta dari komunikasi dua orang atau lebih yang memiliki nasib yang sama, yaitu tidak punya pekerjaan dan kesulitan dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh tingkat Pendidikan yang juga kurang mumpuni, Dari percakapan tersebut, lahirlah hasrat untuk berpikir agar bisa mendapatkan penghasilan yang tidak perlu mengandalkan standarisasi dan sertifikasi pendidikan. Pada akhirnya, perbuatan yang merugikan dan meresahkan orang lain terpaksa diambil dan dihalalkan. Berdasarkan dengan wawancara dari salah seorang narasumber yaitu, Yafiz Faturrahman, ditemukan fakta bahwa pelaku pungli yang ia kenal juga terlahir dari keluarga yang boleh dibilang kurang tersentuh dan menyentuh pendidikan.

Salah satu bentuk pungli yang terjadi di pasar tradisional Kota Tangerang Selatan adalah yang dirasakan oleh Riki, seorang pemuda 24 tahun, perantau dari Sumatera Barat. Ia berdagang di Pasar Ciputat dan kemudian di Pasar Jombang. Tempatnya berdagang di Pasar Jombang adalah lapak milik sendiri, karna di Pasar Ciputat sebelumnya, ia masih berstatus ikut membantu usaha pamannya. Contoh pungli yang kerap terjadi adalah “kuli panggul” yang biasa menawarkan jasa angkut barang kepada konsumen ke tempat dimana kendaraan konsumen di parkir. Mereka yang sudah diberi upah jasa oleh konsumen, masih juga meminta lagi ongkos jasa angkut kepada pedagang lapak, dengan alasan keamanan barang dan royalti sebagai sumber daya manusia yang mengangkut barang dagangan tersebut. Kondisi ini terjadi di Pasar Ciputat. Sedangkan di Pasar Jombang, berdasarkan keterangan narasumber yang sama, pada malam hari dimana pasar tersebut sudah mulai berkurang aktivitasnya (pasar Jombang tidak buka 24 jam, kegiatan malam hari pun hanya sekedar *loading* barang masuk pasar) pernah terjadi penggerebekan peredaran dan penyakahgunaan narkotika di pasar tersebut.



Gambar 2. Riki (Pedagang Pasar Jombang)

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Faktor penyebab pungli di pasar tradisional berdasarkan penelitian lapangan adalah kepemilikan dan penguasaan wilayah dilandaskan pada nenek moyang atau pendahulunya. Artinya, kebanyakan penguasa wilayah adalah orang yang kakek dan neneknya sudah lahir di wilayah tersebut. Di Pasar Prima misalnya, pelaku dari pungutan liar adalah warga “kawakan” dalam artian sudah sangat lama tinggal di wilayah tersebut. Setiap seminggu sekali ia menagih uang pungutan kepada para pedagang di pasar tersebut dengan dalih keamanan pasar. Pelaku tersebut adalah generasi kedua. Sebelumnya, yang menjadi eksekutor dalam penagihan uang pungutan adalah bapak sang pelaku yang sudah wafat beberapa tahun silam. Rentetan faktor keturunan ini pun bersambung lagi kepada anak dari sang pelaku, yang berarti ia adalah generasi ketiga. Faktor kedua adalah fasilitas yang ada kurang didukung dengan profesionalisme aparat berwenang dan rasa peduli yang cenderung minim dicampur dengan rasa pasrah akan keadaan yang ditunjukkan oleh masyarakat atas fenomena pungutan liar ini.



Gambar 3. Yafiz Faturrahman (Tokoh Pemuda Masyarakat Kelurahan Pondok Kacang Timur)

Sumber: Dokumentasi pribadi

Pungli di pasar tradisional seperti layaknya konsep berkehidupan yang minor namun sudah terlanjur menjadi budaya. Kejanggalan yang terjadi adalah keresahan yang sesungguhnya mengganggu kenyamanan hati dan mobilisasi kegiatan Masyarakat. Namun sayangnya, rasa kepedulian antar sesama masyarakat untuk menyingkirkan pungutan liar dan mendorong ke arah yang lebih baik juga minim. Keterangan ini diperoleh dari Ketua RT Komplek Arinda Permai, sebuah perumahan yang juga dekat dengan lingkungan Pasar Arinda.



Strategi Pencegahan Kejahatan

ine Andry Pratama, Monica Margaret
emasyarakatan di Lingkungan Pasar
adisional se-Kota Tangerang Selatan

Gambar 4. Hamidi, S.Sos., M.Ikom (Ketua RT Komplek Perumahan Arinda Permai)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis

Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Kemasyarakatan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki tugas mengelola pasar-pasar tradisional yang terintegrasi langsung ke Pemerintah Kota. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Maya Mardiana mengungkapkan selalu melakukan peningkatan mutu kualitas sarana prasarana serta pelayanan terhadap lima pasar tradisional, binaan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Ada lima pasar yang dikelola oleh UPT Pasar dibawah Disperindag yaitu Pasar Ciputat, Pasar Cimanggis, Pasar Pamulang, Pasar Jengkol dan Pasar Gintung, serta tiga pasar dibina yaitu Pasar Serpong, Pasar Bintaro dan Pasar Jombang. Pernyataan ini dikemukakan beliau pada Rabu 14 April 2021 dan dipublikasikan pada Kamis, April 2021 oleh Portal Media Online Banten News. Semua unsur pemerintah kota yang ada, tentu berkewajiban untuk menjaga amanah dan melaksanakan tugas untuk mengayomi masyarakat, yang dalam prinsip negara berdemokrasi pemerintah, penegak hukum dan segala pihak berkewajiban sejatinya tetap bagian utuh dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan data hasil wawancara narasumber dan observasi lapangan yang penulis lakukan selama kurang lebih tiga bulan terakhir di Kota Tangerang Selatan, strategi pencegahan kejahatan ternyata masih kurang berjalan dengan baik dan berkualitas. Hal ini karena aparat berwenang dari pemerintahan kota belum sepenuhnya hadir untuk masyarakat. Bahkan sebagaimana yang terjadi di lapangan, para oknum dari kalangan masyarakat justru merasa memiliki tanah dan wilayah dan seakan punya wewenang terhadap pasar.

Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim menjelaskan, dalam perspektif makro, kontrol sosial bergantung dari kekuatan-kekuatan yang ada di tengah masyarakat. Penulis merefleksikan kajian tersebut dengan yang terjadi di lingkungan pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan dengan para segerombolan orang-orang yang merasa punya kekuatan dari faktor seberapa sudah lamanya mereka dan leluhur mereka mendiami wilayah tersebut. Di sini semua kalangan masyarakat Kota Tangerang Selatan sebenarnya sudah punya kekuatan berbasis masyarakat,

bahkan sah dan resmi dimata negara, yaitu Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan segala unsurnya yang biasa disebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMIPDA) meliputi Walikota beserta jajaran sampai ke tingkat RW dan RT, Kapolres beserta jajaran hingga ke Polsubsektor, Kepala Kejaksaan Negri Kota, Komandan Kodim TNI AD, hingga Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat. Semua adalah bagian dari kekuatan masyarakat yang menjadi penjaga kebersamaan masyarakat. Namun demikian, pemerintah dan segala unsur FORKOMIPDA tidak akan berarti apapun jikalau tidak ada dukungan dan kepedulian dari masyarakatnya sendiri. Hal ini juga dibenarkan dalam teori kontrol sosial dengan pendekatan mikro, masyarakat hadir dengan segala karakter, etnis dan tujuannya. Apalagi jika bicara Kota Tangerang Selatan sebagai penyangga Ibu Kota Negara.

Kesimpulan dan Saran

Pungutan Liar adalah masalah sosial yang secara kasat mata terkesan sepele karena dilakukan tidak langsung besar-besaran dengan porsi waktu dalam hitungan hari, minggu bulan. Dalam penelitian yang mengutamakan unsur kekuatan Masyarakat, penulis berharap pihak yang paling bertanggung jawab dan mendapatkan amanah untuk menjadi pelayan, pembimbing, pelindung dan merepresentasikan masyarakat dalam hal ini adalah Pemerintah daerah, Kepolisian, Jaksa dan para stake holder yang terkait dalam naungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMIPDA) bisa senantiasa membangun komunikasi yang lebih baik lagi kepada seluruh lapisan masyarakat. Proses pembenaran dan pelurusan sebuah budaya yang sudah melekat lama di masyarakat memang bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh lagi sekedar menunggu untuk mendapatkan sebuah hak atau pelayanan. Masyarakat yang resah akan keadaan, harus mulai bersikap dan bergerak untuk membantu dan mencari solusi bersama untuk mengurangi hal-hal menjadi masalah sosial.

Referensi

- Liliwari, A. (2003). *Makna Budaya dan Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Napitupulu, E. L. (2012, September 13). *Pendidikan Tak Merata, Kualitas Masyarakat Tertinggal*. Retrieved from Kompas.com: <https://edukasi.kompas.com/read/2012/09/13/16333195/Pendidikan.Tak.Merata.Kualitas.Masyarakat.Tertinggal>
- Sasmito, A. (2010). *Betawi Tumbuh Seperti Pohon Salak: Studi Pengalaman Akulturasi Orang Betawi Condet Balekambang Dalam Perspektif Psikologi*.
- Yunardhani, R. (2012). *Kondisi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat (Community Crime Prevention di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur))*.